

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Keadaan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia saat ini sedang mengalami kemerosotan. Kemerosotan tersebut disebabkan oleh adanya dominasi kekuasaan yang berupaya membatasi kebebasan warga negara untuk berpartisipasi, mengeluarkan pendapat baik dalam bentuk saran maupun kritikan. kemerosotan tersebut ditandai dengan ketidakbebasan bahkan banyak masyarakat yang tidak merasakan kesejahteraan. Sehingga, banyak masyarakat yang belum menikmati atau merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Justru yang terjadi ialah kemiskinan, baik kemiskinan secara ekonomi maupun kemiskinan kesempatan untuk mengekspresikan atau mengaktualisasikan kemerdekaan yang sudah diraih oleh negeri ini. Hal ini tentu disebabkan oleh maraknya pembangunan dari atas.

Pada masa Orde Baru, dominasi kekuasaan selalu ditandai dengan adanya pembangunan dari atas. Namun untuk mewujudkan hal itu, negara selalu menggunakan kekerasan, baik fisik maupun psikis seperti pembungkaman dan pemberangusan berbagai macam surat kabar atau dengan kata lain ketidakbebasan pers. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi kekuasaan era Orde Baru masih terus bergulir sampai dengan saat ini (era reformasi). Kekerasan tersebut, sudah secara otomatis akan menciptakan ketidakadilan.

Dalam diskursus publik, hal yang seringkali diperdebatkan bahkan dipertanyakan ialah merosotnya pembangunan dari bawah, demokrasi serta keadilan sosial. Persis hal ini tampak dalam situasi demokratis Indonesia saat ini, di mana demokratisasi hanya dirasakan bahkan dimiliki oleh segelintir orang yang memiliki akses pada kekuasaan, sedangkan kelompok atau masyarakat kecil yang tidak memiliki akses pada kekuasaan terus mengalami penderitaan. Tidak hanya itu, kemerosotan demokrasi juga disebabkan adanya pembungkaman terhadap organisasi-organisasi masyarakat dan pers. Pers dan organisasi masyarakat saat ini

dikatakan sebagai pilar ke empat demokrasi, sebab eksistensi demokrasi hanya bisa ditentukan melalui pers yang bebas.

Kebebasan pers secara prosedural dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pembentukan pers secara mendasar berbasis pada asas keterbukaan dan kebebasan berpendapat. Meskipun demikian, hadirnya UU ITE secara tidak langsung membatasi kebebasan berpendapat setiap warga negara dan bahkan memperlemah sistem demokratisasi di Indonesia. Imajinasi kelompok superior (negara) berusaha untuk mendominasi segala aspek kehidupan warga negara dicapai melalui berbagai cara seperti stigma, prasangka bahkan melalui pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan tersebut tampak dalam pembatasan kebebasan, baik kebebasan untuk menyampaikan pendapat maupun kebebasan untuk berpartisipasi dalam ruang publik.

Pembatasan tersebut ditandai dengan adanya diskriminasi kelompok-kelompok tertentu yang dianggap terlalu kritis dalam menanggapi kebijakan negara yang dipandang kurang atau bahkan tidak berdayaguna bagi kehidupan warga negara. Hal ini tampak dalam tindakan elit politik, aparatur negara yang kerap kali melakukan tindakan korupsi. Akibatnya, melemahnya kepercayaan publik terhadap integritas dan kualitas institusi-institusi publik, karena dianggap kurang bahkan tidak adil. Ketidakadilan sosial yang kerap kali terjadi mengafirmasi aspek kesadaran masyarakat tentang ketidakmerataan pembangunan, ekonomi dan politik yang diciptakan sendiri oleh negara, sebab ketimpangan distribusi ekonomi yang tidak adil dan merata akan berdampak pada penderitaan warga negara yang serba keterbatasan.

Dengan demikian, hadirnya *civil society* bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang bebas, menyelamatkan demokrasi agar tidak jatuh ketangan autokrasi yang totaliter sekaligus menyelamatkan warga negara dari arogansi kekuasaan yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM, ketidakadilan sosial, agar cita-cita dan harapan semua warga negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengekspresikan kebebasannya dapat tercapai.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Negara

Fenomena ketidakadilan seperti pembangunan yang tidak merata dan korupsi yang merajalela merupakan alasan mendasar terbentuknya sebuah organisasi *civil society*. Tentu hal ini terdorong oleh rasa kepedulian dan perikemanusiaan terhadap sesama yang lain di tengah fenomena ketidakbebasan dan ketidakadilan, bahwasanya fenomena inilah yang menyebabkan kesejahteraan semakin menjauh dari kehidupan warga negara. Dengan kata lain, kurangnya keadilan sosial dan kebebasan menimbulkan kesejahteraan masyarakat jauh panggang dari api, sementara itu, negara memaksakan masyarakat untuk tunduk pada kekuasaan.

Oleh sebab itu, negara yang menganut sistem demokrasi mestinya berpijak pada hakikat yang paling dasar yakni menciptakan manusia-manusia yang bebas tanpa harus mengendalikan oleh kebebasan orang lain, agar kemampuan rakyat untuk keluar dari penderitaan masa lalu dapat terealisasi. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Karena itu, negara mesti menjadikan penegelman masa lalu (Orde Baru), sebagai upaya untuk memulihkan selain ekonomi masyarakat, juga kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.

Pendapat atau kritikan dari masyarakat adalah sebuah kejujuran yang mesti dijadikan sebagai dasar dalam menentukan dan memutuskan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga penyelewengan kebijakan sekaligus penyelewengan kekuasaan dapat diminimalisir. Dengan demikian, eksistensi *civil society* dalam sebuah negara, sudah sepantasnya dan selayaknya harus dijamin, sebab tanpa *civil society*, negara akan terjerumus ke dalam sistem totaliter dan sarat akan penyelewengan.

5.2.2 Bagi Organisasi *Civil Society*

Organisasi *civil society* merupakan sebuah organisasi yang secara konstitusi berada diluar pemerintahan, namun dalam sejarah reformasi, peran *civil society* memiliki rekam jejak yang justru melahirkan kebebasan bagi setiap warga

negara. Lahirnya reformasi merupakan sebuah perjuangan *civil society*, di mana ditandai adanya penggulingan rezim Soeharto pada masa Orde Baru yang dianggap terlalu bersikap autokrasi yang otoriter dalam memimpin negara yang plural ini.

Namun, konsistensi *civil society*, kerap kali dipertanyakan, sebab praksisnya pergerakan atau perjuangan *civil society* saat ini dianggap masih jauh dari independensi, tetapi justru berjalan berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Artinya, perjuangan ini hampir pasti tidak murni berdasarkan suara rakyat tetapi berdasarkan suara kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Karena itu, untuk mempertahankan tegaknya demokrasi, eksistensi *civil society* mestinya terlepas dari intervensi kekuasaan, agar efektivitas *cheks and balance* dapat berjalan baik tanpa dikendalikan oleh sebuah kekuatan besar yakni pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- Watimena, Reza. *Demokrasi, Dasar Filosofis dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Alien, George dan Unwin. *Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial Dan Politik*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1988.
- Baghi, Felix, ed. *Pluralisme, Demokrasi, dan Toleransi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Broto Susilo, Agus dan Soerjono Soekanto. *Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1987.
- Budi Hardiman, F. *Demokrasi dan Sentimentalitas*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2018.
- Budi Kleden, Paul. *Catatan Tentang Pemilu Bukan Doping Politik*. Maumere: Penerbit Ledaero, 2013.
- Budiman, Arief. "Kebebasan, Keadilaan Sosial Dan Romo Magnis", dalam Eddy Kristiyanto, ed. *Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Eriyanto. *Kekuasaan Otoriter Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni*. Yogyakarta: INSIST, 2000.
- Faulks, Keith. *Teori-teori Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat Sipil*. Terj. Helmi Mahadi dan Shohifillah. Bandung: NusaMedia, 2021.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Gusti Madung, Otto. *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2011
- , *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Ledalero, 2014.
- , *Politik Antara Legalitas dan Moralitas*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- , *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.

- Hanafi, Ahmad dkk. *Politik Representasi Masyarakat Adat*. Jakarta: Pusat Parlemen Indonesia, 2017.
- Held, David. *Models of Democracy*. Terj. Abdul Haris. Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006.
- Herry Priyono, B. *Korupsi (Melacak Arti, Menyimak Implikasi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Hutauruk, M. *Menuju Terwujudnya Suatu Masyarakat Adil Makmur Di Republik Indonesia Tahun 2000-an*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987.
- J. A, Denny. *Visi Indonesia Baru Setelah Reformasi 1998*. Yogyakarta: LKIS, 2006.
- Joachim Friedrich, Carl. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nusa Media, 2004.
- Keladu Koten, Yosef. *Etika Keduniawian: Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- , *Partisipasi Politik Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Terj. Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Magnis-Suseno, Franz. *Mencari Sosok Demokrasi*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- , *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.
- , *Kuasa Dan Moral*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1988.
- Mas'oed, Mohtar. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Muhammad Hatta: *Bapak Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Mulder, Niels. *Wacana Publik Asia Tenggara Menuju Masyarakat Madani*. Terj. A. Widyamartaya. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.
- , *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Mulyadi, Mohammad. *Falsifikasi Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

- Poespowardojo, Soerjanto. *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosial Budaya*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1989.
- Rawls, John. *Teori Keadilan*. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Soedarmanta, J.B. *Politik Bermartabat*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011.
- Soedjatmoko. *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*. Terj. Aswab Mahasin. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1983.
- , *Pembangunan dan Kebebasan*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Sudiboyo, Agus dkk. *Republik Tanpa Ruang Publik*. Yogyakarta: Ire Press, 2005.
- Sulisworo, Dwi. *Peningkatan Civil Society Untuk Kemajuan Iptek dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Cetta Media, 2013.
- Sunaryo. *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen integritas kebebasan dalam pilihan sosial, demokrasi, dan pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Tan, Peter. *Paradoks Politik*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2018.
- Taopan, M. *Demokrasi Pancasila analisis konsepsional aplikatif*. Kupang: Sinar Grafika, 1989.
- Tokan Pureklolon, Thomas. *Komunikasi Politik Mempertahankan Integritas Akademis, Politikus dan Negarawan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Yuhana, Abdy. *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2020.

II. ARTIKEL

- Donnelly, Jack. “Konsep Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia”, dalam Frans Ceunfin, ed. *Hak-Hal Asasi Manusia Pendasaram dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Jilid 1. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Dhakidae, Daniel. “Etika Sebagai Kewajiban Politik, Kekerasan, dan Negara Orde Baru”, dalam Eddy Kristiyanto, ed. *Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Djunatan, Stephanus. “Nilai Filosofis Sila IV: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, dalam *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.

- Kaisiepo, Manuel. "Antara Negara Kesejahteraan Dan Masyarakat Madani", dalam Frans M. Parera dan T. Jakob Koekerits. *Masyarakat Versus Negara, Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002.
- Kleden, Ignas. "Demokratisasi Kepemimpinan Politik", dalam Frans M. Parera dan T. Jakob Koekerits. *Masyarakat Versus Negara, Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*. Jakarta: PT Kompas Media, 1999.
- Kristiyanto, Eddy. "Opsi, Keadilan, Keluasan, Kepedulian dan Keterarahan Romo Magnis", dalam Eddy Kristiyanto, ed. *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Leksono-Supelli, Karlina. "Mendengarkan Suara Kesunyian", dalam Eddy Kristiyanto, ed. *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Muller, Johannes. "Politik Pembangunan dan Keadilan Global" dalam Eddy Kristiyanto, ed. *Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Qodir, Zuly. "Prasyarat Budaya Civil Society", dalam Frans M. Parera, T. Jakob Koekerits. *Masyarakat Versus Negara. Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2000.
- Sudiarja, A. "Negara Hukum dan Civil Disobedience" dalam Eddy Kristiyanto, ed. *Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Suryadi, Karim. "Demokratisasi Pendidikan Demokrasi", dalam Frans M. Parera dan T. Jakob Koekerits. *Masyarakat Versus Negara, Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002.

III. JURNAL

- Abidin Saleh, Zainal. "Demokrasi dan Partai Politik". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5:1, Maret 2008.
- Argenti, Gili. "Civil Society, Shadow State dan Local Strongmen Dalam Kajian Politik Lokal". *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4:1, April 2018.
- Aditiyawarman. "Pembangunan Politik Dan Kualitas Demokrasi". *Jurnal Moderat*, 6:2, Mei 2020.
- Bambang Irawan, Benny. "Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5:1, Oktober 2007.

- Daven, Mathias. "Korupsi dan Demokrasi". *Jurnal Ledalero*, 15:1, Juni 2016.
- . "Politik Pemusnahan dan Pemusnahan Politik telaah Kritis Atas Konsep Hannah Arendt Tentang Totalitarianisme". *Jurnal Ledalero*, 14:1, Juni 2015.
- Darmawan, Lalu dan Masroer C Jb. "Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) Di Indonesia". *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10:2, April 2016.
- De Liska, Luh dan Luh Putu Swandewi Antari. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penguatan Karakter Bangsa". *Jurnal Widyadari*, 21:2, Oktober 2020.
- Gusti Madung, Otto. "Pancasila, Demokrasi Liberal Dan Komunitarisme". *Jurnal Ledalero*, 13:2, Desember 2014.
- Iskandar, Rusli. "Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Membangun Masyarakat Madani". *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 16:3, April 2000.
- Indrajat, Himawan. "Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi". *Jurnal Sosiologi*, 18:1, April 2021.
- Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Jurnal Yustisia*, 3:2, Agustus 2014.
- Keladu Koten, Yosep. "Banalitas Kejahatan Korupsi Dan Aktivitas Berpikir". *Jurnal Ledalero*, 15:1, Ledalero: Juni 2016.
- Mohamad Faiz, Pan. "Teori Keadilan Jhon Rawls". *Jurnal Konstitusi*, 6:1, April 2009.
- Noor, Firman. "Masyarakat Indonesia". *Jurnal LIPI*, 42:1, Juni 2016.
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Civis*, 1:2, Januari 2021.
- Parmudi, Mochamad. "Kebangkitan Civil Society di Indonesia". *Jurnal at Taqaddum*, 7:2, November 2015.
- Supriadi, Yadi. "Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas". *Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung*, 1:1, Desember 2017.
- Sofwan, Edi. "Penguatan Civil Society Berdasarkan Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Surya Kencana Dua*, 4:2, Desember 2017.

Syafriadi. “Pelaksanaan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Uir Law Review*, 1:1, April 2017.

Sunaryo. “Amartya Sen tentang teori keadilan John Rawls”. *Jurnal Respons*, 23:01, Juli 2018.

Usman, Sunyoto. “Civil Society di Indonesia: Suatu Tantangan”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5:3, Maret 2002.

IV. PDF

Baghi, Felix. “Keadilan Transisional: Merespons Ketidakadilan Masa Lalu”. Stadium Generale, di STFK Ledalero pada 23 Oktober 2021.

Gusti Madung, Otto. “Rekonstruksi Diskursus Kontemporer Tentang Keadilan Distributif: John Rawls dan Michael Sandel”. Stadium Generale, di STFK Ledalero pada 25 September 2021.

V. SKRIPSI

Fantura Doreng, Fransiskus. “Politik Pembangunan Menurut Amartya Sen Dan Relevansinya Bagi Indonesia”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

VI. MANUSKRIP

Daven, Mathias. “Politik Pembangunan dalam Pandangan Amartya Sen”. Bahan Kuliah Pilihan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2019.

VII. INTERNET

Harbowo, Nikolaus. “Relasi Kekuasaan Tak Seimbang, Rekonsolidasi Demokrasi Mendesak Dilakukan”, <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/08/07/relasi-kekuasaan-tak-seimbang-rekonsolidasi-demokrasi-mendesak-dilakuka>>, diakses pada 26 Februari 2022.

Mulachela, Husen. “Memahami Partai Politik, Pengertian, Fungsi dan Sistemnya”, dalam *Katadata*, <<https://katadata.co.id/amp/agung/berita/624c0dd3d51b9/memahami-partai-politik-pengertian-fungsi-dan-sistemnya>>, diakses pada 11 April 2022.

Mushlihin, “Sejarah Perkembangan Masyarakat Sipil”, <<https://www.referensimakalah.com/2012/12/sejarah-perkembangan-masyarakat-sipil.Html?m=1>>, diakses pada 13 Maret 2022.

Rahayu Risan, Pudjo. “meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia”, <<https://koransulindo.com/meningkatkan-indeks-demokrasi-indonesia/>>, diakses pada 1 Maret 2022.

Satyadarma, “Johannes Leimena, Politik Untuk Melayani Rakyat”, <<http://koransulindo.com/johannes-leimena-politik-untuk-melayani-rakyat/>>, diakses pada 5 Februari 2022.

VIII. BULETIN

Ancok, Djamaludin. “Membangun kepercayaan Menuju Indonesia Madani, Demokratis dan Damai”, *Buletin*, 2 Desember 2002.